

## Anggota DPR Apresiasi Pemerintah Cepat Respons Kasus Gagal Ginjal

JAKARTA (IM) - Anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo mengapresiasi langkah Pemerintah cepat merespons kasus gagal ginjal pada anak yang ada dugaan akibat obat sirip.

"Artinya Pemerintah sudah sangat responsif terhadap situasi dan kondisi seperti ini," kata anggota Komisi IX DPR Rahmad Handoyo di Jakarta, dilansir Antara, Selasa (25/10).

Pemerintah meneliti, menyelidiki, berkomunikasi dengan WHO, bahkan menarik obat dari pasaran. Rahmad tidak melihat indikasi lempar tanggung jawab.

Semua itu, kata dia, bekerja dalam semangat yang sama, yakni mencegah bertambahnya korban. Kementerian Kesehatan, BPOM, dan IDAI berkolaborasi. Presiden Joko Widodo pun memberikan perhatian sangat serius terhadap masalah ini.

"Apakah ini ada pelanggaran administrasi, prosedur, dan hukum? Kita serahkan ke kepolisian. Pemerintah juga sudah meminta Kapolri untuk mendalami dan menyelidiki. Polri menjawab itu dengan membentuk tim khusus, jadi biarlah Polri yang akan membuka terang benderang," kata Rahmad.

Rahmad mengatakan bahwa DPR mendukung penuh setiap langkah Pemerintah untuk mencegah lebih banyak korban. Namun, Rah-

mad menilai masyarakat ingin ada pihak yang bertanggung jawab terhadap masalah ini.

Presiden Jokowi memimpin rapat terbatas yang membahas perkembangan penyakit gagal ginjal akut pada anak di Istana Kepresidenan Bogor, Senin (24/10).

Rapat terbatas dihadiri Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, dan Kepala BPOM Penny Lukito. Presiden Jokowi bahas soal obat-obatan sirip yang terindikasi menjadi penyebab gangguan ginjal akut pada anak.

Setidaknya, Presiden menyampaikan empat arahan terkait dengan kasus gagal ginjal pada anak. Pertama, Jokowi meminta keselamatan masyarakat jadi prioritas. "Jangan menganggap ini masalah kecil," kata Presiden Jokowi.

Kedua, Presiden meminta penghentian peredaran obat yang terbukti mengandung bahan penyebab gangguan ginjal akut pada anak. Ketiga, Kemenkes harus melakukan penelitian secara menyeluruh. Keempat, memerintahkan Kemenkes menyiapkan fasilitas kesehatan.

"Saya minta diberikan pengobatan gratis kepada pasien-pasien yang dirawat. Ini penting sekali," ujar presiden. ● han



**PEMERIKSAAN WAHID IKHSAN WAHYUDIN** Tersangka mantan Pemeriksa Pertama BPK Perwakilan Provinsi Sulsel Wahid Ikhsan Wahyudin tiba untuk menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (25/10). Wahid Ikhsan Wahyudin diperiksa sebagai tersangka terkait kasus dugaan suap pemeriksaan laporan keuangan di Dinas Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan 2019-2020.

## Ombudsman RI Minta Pemerintah Sanksi Tegas Produsen Obat Sirip Nakal

JAKARTA (IM) - Ombudsman RI menyoroti sejumlah hal ke Kementerian Kesehatan (Kemenkes RI) serta Badan Pengawas Obat dan Minuman (BPOM) terkait kasus gagal ginjal akut misterius. Ombudsman meminta Kemenkes dan BPOM membenahi akurasi data kasus gagal ginjal.

"Pertama adalah kami meminta untuk membenahi ketersediaan dan akurasi data, ini kami minta kepada Kementerian Kesehatan dan badan POM, kemudian kedua adalah keterbukaan informasi. Publik berhak untuk mengetahui informasi kesehatan yang valid dan terpercaya," kata Pimpinan Ombudsman RI, Robert Endi Jaweng, kepada wartawan dalam konferensi pers secara virtual, Selasa (25/10).

Robert mengatakan Ombudsman RI juga meminta Kemenkes RI serta BPOM memenuhi standar pelayanan publik terkait penanganan kasus gagal ginjal. Dia menyebut salah satunya penetapan ambang batas kandungan senyawa dalam setiap produk.

"Kemudian, ketiga, kita meminta agar pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan dan badan POM untuk memenuhi standar pelayanan publik yang ada, termasuk tadi standar terkait dengan batas atas ambang batas dari kandungan senyawa berbahaya pada setiap produk yang dikeluarkan, sekaligus juga pelayanan pemeriksaan laboratorium hingga di fasilitas kesehatan tingkat pertama dan fasilitas kesehatan tingkat lanjut," tuturnya.

Selain itu, dia mengatakan pengawasan terhadap peredaran obat harus dilakukan dengan ketat. Pengawasan itu harus dilakukan sebelum izin edar diberikan hingga setelah peredaran.

"Kemudian juga kami meminta untuk pengawasan yang sangat ketat terhadap peredaran obat, baik sebelum peredaran atau premarket maupun setelah peredaran, post market control," ucapnya.

Dia menyebut perusahaan nakal yang masih mengedarkan produk obat yang saat ini dilarang pemerintah harus disanksi tegas. Menurutnya, kontrol Kementerian Kesehatan RI dan BPOM dalam penanganan kasus gagal ginjal ini harus ditunjukkan secara nyata.

"Kemudian, ketersediaan akses layanan pengaduan dari masyarakat dan pemenuhan informasi yang dibutuhkan, dan terakhir tentu adalah adanya sanksi yang keras terhadap perusahaan farmasi yang memproduksi dan mengedarkan produk-produk yang sudah ditetapkan oleh pemerintah sebagai produk yang sementara ini dicabut atau ditahan untuk tidak kemudian diedarkan kepada masyarakat," ujarnya.

"Jadi kontrol dari pemerintah, kontrol dari Kementerian Kesehatan, dari badan POM itu harus ditunjukkan secara nyata, secara signifikan kepada publik lewat berbagai cara. Apakah sidak ke berbagai perusahaan, sidak ke berbagai pusat-pusat penjualan, toko-toko dan sebagainya, sehingga kemudian ini bisa lebih terjamin kontrolnya," lanjutnya.

Sebelumnya, Kementerian Kesehatan RI menyampaikan data terbaru mengenai kasus gagal ginjal akut pada anak. Kasus ini sudah dilaporkan di 26 provinsi.

"Perkembangan kasus gagal ginjal akut per 24 Oktober terdapat 255 kasus, yang meninggal 143 meninggal," kata juru bicara Kemenkes dr Mohammad Syahril dalam konferensi pers. ● osm

# 2 Polhukam

FOTO: ANT



## Kominfo: Persiapan KTT G20 Sudah 90%

KTT G20 yang akan dihadiri pimpinan negara dari anggota G20 merupakan kegiatan puncak Presidensi G20 di Indonesia. Ada beberapa kegiatan yang menjadi rangkaian acara G20 yang berlangsung sepanjang tahun ini.

JAKARTA (IM) - Indonesia memegang kepemimpinan atau Presidensi G20 tahun ini yang akan digelar di Bali pada 15-16 November mendatang. Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika memastikan semua agenda dalam penyelenggaraan Presidensi G20 akan berjalan lancar.

Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kemkominfo Usman Kasong menegaskan kesiapan penyelenggaraan KTT G20. Keamanan, kesiapan infrastruktur, jaringan telekomunikasi dan transportasi menjadi poin-poin penting kesiapan KTT G20.

"90 persen persiapan sudah kita siapkan. Informasi terakhir dari Menlu, semua kepala negara G20 akan hadir di Bali," ujar Usman dalam keterangan tertulis, Selasa (25/10).

KTT G20 yang akan dihadiri pimpinan negara dari anggota G20 merupakan kegiatan puncak Presidensi G20 di Indonesia. Ada beberapa kegiatan yang menjadi rangkaian acara G20 yang berlangsung sepanjang tahun ini.

Rentetan kegiatan ini dikatakan Usman memiliki manfaat strategis dari Presidensi G20. Menurutnya potensinya bisa diukur dari aspek ekonomi, politik luar negeri maupun

bangunan sosial.

Dalam sisi ekonomi, Presidensi G20 akan berdampak langsung bagi perekonomian dengan peningkatan penerimaan devisa negara. Pengalaman mencatat Presidensi G20 sebelumnya membawa pemasukan lebih dari \$100 juta atau Rp1.4 triliun kepada host country.

Di bidang politik, lanjutnya, Indonesia sebagai ketua G20 dapat mendorong kerja sama dan menginisiasi hasil konkret pada ketiga sektor prioritas, yang strategis bagi pemulihan global. Ini merupakan momentum bagi Indonesia untuk memperoleh kredibilitas atau kepercayaan dunia dalam memimpin pemulihan global, karena kredibilitas adalah modal yang sangat berharga dalam diplomasi dan dunia politik.

Ketiga, dalam bidang pembangunan ekonomi dan sosial berkelanjutan, G20 menjadi momentum untuk menunjukkan bahwa Indonesia is open for business. G20 kesempatan

bagi showcase atau event untuk menampilkan kemajuan pembangunan Indonesia, dan potensi investasi di Indonesia.

Ini diharapkan dapat menciptakan multiplier effect bagi perekonomian daerah karena berkontribusi bagi sektor pariwisata, akomodasi (perhotelan), transportasi dan ekonomi kreatif, serta UMKM lokal.

KTT G20 juga akan membahas agenda-agenda diantaranya energi terbarukan, Kolaborasi Jaringan Kesehatan Global, Ekonomi Digital dan Stabilitas Politik Global. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan Indonesia telah memiliki peta jalan transisi energi untuk mencapai netral karbon pada tahun 2060, atau lebih cepat.

## KUNJUNGAN KERJA WAMENKUMHAM DI PALANGKA RAYA

Wakil Menteri Hukum dan HAM, Edward Omar Sharif Hiariej (kedua kiri) didampingi Kepala Kanwil Kemenkumham Kalimantan Tengah Hendra Eka Putra (kiri) meninjau fasilitas pembuatan paspor di Kantor Imigrasi Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Selasa (25/10). Wamenkumham meninjau sejumlah fasilitas UPT Kemenkumham Kalteng serta berbagai hasil kerajinan dari warga binaan Lapas Kelas IIA dan Rutan Kelas IIA di kota itu.

## KPK Lelang Barang Rampasan Milik 3 Terpidana Korupsi

JAKARTA (IM) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan melelang barang rampasan milik tiga terpidana perkara korupsi berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

"KPK bersama dan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Dumai akan melaksanakan lelang barang rampasan tidak bergerak melalui metode 'closed bidding' berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, sebagai berikut barang rampasan 20.000 meter persegi yang terletak di Desa Buruk Bakul, Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis milik Handoko Setiono sesuai dengan buku tanah hak milik nomor 14 Provinsi Riau, Kabupaten Bengkalis, Kecamatan Bukit Batu, Desa/Kelurahan Buruk Bakul, (tidak dilengkapi dengan bukti kepemilikan) dengan harga limit Rp381.131.000,00 dan uang jaminan Rp90.000.000,00.

Satu bidang tanah seluas 20.000 meter persegi yang terletak di Desa Buruk Bakul, Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis milik Handoko Setiono sesuai dengan buku tanah hak milik nomor 14 Provinsi Riau, Kabupaten Bengkalis, Kecamatan Bukit Batu, Desa/Kelurahan Buruk Bakul, (tidak dilengkapi dengan bukti kepemilikan) dengan harga limit Rp259.102.000,00 dan uang jaminan Rp60.000.000,00.

Selain itu, KPK juga akan melelang barang rampasan terpidana Umar Ritonga yang merupakan orang dekat mantan Bupati Labuhanbatu Pangonal Harahap. Umar ialah terpidana perkara suap proyek-proyek di Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara Tahun Anggaran 2018.

Objek yang dilelang, yakni tanah seluas 44.077 meter persegi yang berlokasi di Kelurahan Buruk Bakul, Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis sesuai dengan surat pernyataan ganti kerugian nomor 037/SPGK/BB/VI/2014 tanggal 23-06-2014 (tidak dilengkapi dengan bukti kepemilikan). Harga limit tanah tersebut Rp615.177.000,00 dan peserta lelang diwajibkan memberikan uang jaminan Rp150.000.000,00.

Selanjutnya, tanah seluas 24.342 meter persegi yang terletak di Kelurahan Buruk Bakul, Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis sesuai dengan surat pernyataan ganti kerugian nomor 038/SPGK/BB/VI/2014 tanggal 23-06-2014. (tidak dilengkapi dengan bukti kepemilikan) dengan harga limit Rp343.289.000,00 dan uang jaminan Rp80.000.000,00.

Tanah seluas 52.676 meter persegi yang terletak di Kelurahan Buruk Bakul, Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis sesuai dengan surat pernyataan ganti kerugian nomor 036/SPGK/BB/VI/2014 tanggal 23-06-2014. (tidak dilengkapi dengan bukti kepemilikan) dengan harga limit Rp727.507.000,00 dan uang

"PLN melalui rencana bisnis penyediaan energi nasional pada tahun 2021-2023 juga telah menargetkan rencana bisnis yang lebih bersih dengan menambah pembangkit listrik yang dihasilkan dari energi terbarukan hingga 51,6%. Indonesia telah merencanakan untuk membangun nusantara super grid untuk mendorong pengembangan energi terbarukan dan juga menjaga stabilitas dan keamanan elektrisitas," jelasnya.

Ia menambahkan Indonesia membutuhkan sekitar USD 1 triliun untuk bertransisi energi pada tahun 2060. "Oleh karena itu, Indonesia terus menjalin kerja sama yang lebih erat dengan negara-negara mitra dan lembaga keuangan internasional untuk menemukan mekanisme pendanaan yang inovatif," kata Usman. ● dot

## KPK Setor Denda Rp553 Juta dari Kasus Korupsi Eks Bupati PPU ke Kas Negara

JAKARTA (IM) - KPK menyetor uang Rp553 juta ke kas negara di kasus korupsi mantan Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Abdul Gafur Mas'ud dan kawan-kawan. Dana tersebut berasal dari pembayaran denda dan pengganti dari tiga terpidana korupsi.

"Jaksa eksekutor Andry Prihandono melalui Biro Keuangan KPK telah selesai menyetorkan ke kas negara uang sejumlah Rp 553 juta sebagai pembayaran denda dan uang pengganti dari terpidana Abdul Gafur Mas'ud," kata Plt Juru Bicara Bidang Pencegahan KPK Ipi Maryati Kuding kepada wartawan, Selasa (25/10).

Ipi menyebut penagihan uang denda dan pengganti kepada terpidana korupsi merupakan salah satu agenda utama KPK. Dia mengatakan KPK bakal memaksimalkan pengembalian aset terkait kasus korupsi.

"Tim jaksa eksekusi akan terus aktif melakukan penagihan pidana denda dan uang pengganti ke para terpidana," ucap Ipi.

Selain Abdul Gafur, uang denda lain berasal dari Nur Afifah Balqis, yang mencicil denda Rp100 juta dan menyetor denda Rp200 juta, serta terakhir Jusman, yang telah melunasi denda Rp53 juta. Jadi, jika ditotal, jumlahnya mencapai Rp553 juta.

Tim jaksa eksekutor KPK sebelumnya sudah lebih dulu menagih Abdul Gafur Mas'ud, yang divonis 5,5 tahun penjara terkait kasus korupsi. Abdul Gafur dijebloskan ke Lapas Kelas II-A Balikpapan untuk menjalani masa hukuman.

"Eksekusi dilaksanakan di Lapas Kelas II-A Balikpapan dan Terpidana menjalani masa pidana penjara selama 5 tahun dan 6 bulan dikurangi lamanya masa penahanan sejak penyidikan," kata Pelaksana

Tugas (Plt) Juru Bicara KPK Ipi Maryati dalam keterangan tertulis, Kamis (20/10).

Eksekusi itu dilaksanakan berdasarkan vonis hakim Pengadilan Tipikor pada PN Samarinda yang telah berkekuatan hukum tetap. Diketahui, Abdul Gafur divonis hukuman penjara 5 tahun 6 bulan dikurangi lamanya masa penahanan sejak proses penyidikan.

Selain hukuman pidana, lanjut Ipi, Abdul Gafur diharuskan membayar denda Rp300 juta dan membayarkan uang pengganti senilai Rp5,7 miliar.

"Kewajiban untuk membayar pidana denda sebesar Rp300 juta dan uang pengganti sebesar Rp5,7 miliar," ujarnya.

"Penjatuhan pidana tambahan berupa pencabutan hak dipilih dalam pemilihan jabatan publik selama 3 tahun dan 6 bulan dihitung sejak selesai menjalani pidana pokok," sambungnya. ● han



SIDANG RICHARD ELIEZER

Orang tua Brigadir Yosua Samuel Hutabarat (kanan) dan Rosti Simanjuntak (kedua kanan) menjadi saksi dalam sidang lanjutan kasus pembunuhan Brigadir Yosua dengan terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu (kiri) di PN Jakarta Selatan, Jakarta, Selasa (25/10). Sidang itu beragenda mendengarkan keterangan saksi diantaranya saksi pelapor Kamarudin Simanjuntak, kedua orang tua korban Samuel Hutabarat dan Rosti Simanjuntak serta pacar korban Vera Simanjuntak.